MOTIVASI KOMUNIKASI TRANSAKSIONAL ANTARA ELIT POLITIK DENGAN MASYARAKAT AGRARIS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

¹Muhammad Zein Abdullah

¹ Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Halu Oleo

Email: zein_unhalu@yahoo.co.id

Kota Kendari 93111, Indonesia

Abstract

This study aims to find and explain the motivation for transactional communication between the political elite and the agrarian community in the 2015 Pilkada in North Konawe Regency. Data collection techniques through interview instruments, shadowing techniques by following the political elite, participatory observation, Focus Group Discussion (FGD) and documentation studies.

The results showed that the motivation for transactional communication between the political elite and the agrarian society were: (1) Political Interest Motivation. Political elite motivation for power. (2) Motivation of social relations. Motivation of political elites and agrarian society due to family (clan) (3) Regional proximity motivation: Regional faction that regional proximity was formed in the political sphere in the 2015 election in North Konawe to give rise to regional factions. (4) Motivation for Social and Cultural Relations. (5) The economic motivation of the Agrarian Society is to increase economic investment in agriculture through the development of regional infrastructure, agricultural technology, land clearing, capital assistance, opening of farm roads, fertilizers, seeds, electricity and so on.

Keywords: *agrarian society; Motivation; political elites; regional head elections; transactional communication*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan motivasi komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris pada pilkada 2015 di Kabupaten Konawe Utara. Teknik pengumpulan data melalui instrument wawancara, teknik shadowing dengan cara membuntuti elit politik, observasi partisipatif, Focus Group Discussion (FGD) dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris antara lain (1) Motivasi Kepentingan Politik. Motivasi elit politik untuk kekuasaan. (2) Motivasi hubungan sosial. Motivasi elit politik dan masyarakat agraris karena keluarga (klan) (3) Motivasi Kedekatan wilayah: Faksi Kedaerahan bahwa Kedekatan daerah terbentuk dalam ranah politik pada pilkada 2015 di Konawe Utara hingga menimbulkan adanya faksi kedaerahan. (4) Motivasi Hubungan Sosial dan budaya. (5) Motivasi ekonomi Masyarakat Agraris adalah peningkatan investasi ekonomi bidang pertanian melalui pembangunan infrastruktur daerah, teknologi pertanian, pembukaan lahan, bantuan modal, pembukaan jalan usaha tani, pupuk, bibit, listrik dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *elit politik; komunikasi transaksional; motivasi; masyarakat agraris; pilkada*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015. Pilkada di Indonesia dilakukan secara serentak. Lahirnya Pemilu serentak tersebut dinilai lebih efisien (hemat anggaran) terutama biaya politik, biaya kampanye dan dapat mendidik para pemilih menjadi cerdas dalam memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan kepala daerah yang dipilihnya. Pemilu serentak dipandang bisa menghindari politik transaksional selain mengefektifkan anggaran pemilu.

Pilkada Konawe Utara dilaksanakan yang kedua kalinya untuk periode 2016-2021, sebelumnya pilkada pertama dilaksanakan untuk periode 2010-2016 dengan jumlah wajib pilih sebanyak 44.278 pemilih terdiri atas 21.019 perempuan dan 23.259 laki-laki. Pada pilkada 2015, mengalami penurunan wajib pilih sebanyak 42.059 yang terdistribusi pada wajib pilih laki-laki sebanyak 21.660 WP dan perempuan sebanyak 20.399. (KPU Konawe Utara 2015)

Berdasarkan penetapan KPU Konawe Utara telah menetapkan pasangan Aswad Sulaiman-Abuhaera (ABDIKU) yang diusung PDIP, Hanura, Gerindra dan pasangan Ruksamin-Raup (KONASARA) dengan partai pendukung PAN, PBB, Golkar. Setelah penetapan tersebut, para elit politik yang diusung oleh partai politik gencar melakukan berbagai aktivitas politik, mulai dari penyusunan strategi dengan membentuk tim sukses, menyusun visi, misi dan program kerja serta bekerja sama lembaga survei melakukan pemetaan politik yaitu pemetaan jaringan, pemetaan media massa dan pemetaan masyarakat agraris sebagai pemilih untuk pembentukan citra dan isu politik. Inilah sebagai tahapan awal elit politik sebelum melakukan proses komunikasi transaksional dengan masyarakat agraris pada pilkada 2015 di Konawe Utara.

Implementasi dari rancangan strategi komunikasi transaksional elit politik tersebut, realitasnya bahwa; Elit politik yang tampil pada pilkada 2015 di Konawe Utara adalah sebagai Bupati dan wakil Bupati yang berkuasa saat Pilkada, dimana masing-masing elit politik mengandalkan kekuatan loyalitas (tim sukses), kekuatan birokrasi, kekuatan basis massa pendukung partai politik serta mengandalkan kekuatan basis massa dengan pendekatan kultur budaya, kedekatan wilayah, kesamaan etnis hingga terbentuk kekuatan akan perubahan dari elit politik putra daerah dan bukan putra daerah, kerabat, serta tokoh pendiri Konawe Utara. Kekuatan inilah yang dijadikan elit politik untuk membentuk opini guna mempengaruhi ranah politik masyarakat agraris di Konawe Utara.

Elit politik dalam konteks usaha memperoleh kekuasaan, tiba-tiba merasa tidak memiliki jarak dengan masyarakat agraris, terutama kelompok-kelompok masyarakat agraris, seperti kaum petani, nelayan, buruh dan warga miskin lainnya. Para elit politik dengan serta merta berpihak kepada mereka agar tidak terpinggirkan oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Para elit politik melakukan hal tersebut karena di daerah pedesaan merupakan lumbung suara terutama kaum petani, sehingga menjadikan sasaran dengan

doktrin pembangunan disektor pertanian sebagai sektor yang sangat strategis untuk pembentukan citra dan isu politik.

Fokus pembentukan citra dan isu politik tersebut disajikan kepada masyarakat agraris karena di Kabupaten Konawe Utara mayoritas masyarakatnya bekerja disektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebanyak 51,62%. Tingginya masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, menjadi perhatian elit politik untuk menarik simpatik. Faktualisasi bahwa masyarakat agraris memiliki persoalan pertanian yang kompleks, antara lain; keterbatasan lahan pertanian, bibit, pupuk, obat-obatan, terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan; terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi; infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai, rendahnya pengetahuan/wawasan, rendahnya tingkat keterampilan, kurangnya motivasi, tidak memiliki kemampuan pengelolaan usaha tani, kurangnya dukungan atas modal dan sarana produksi usahatani, kurangnya dukungan kebijakan pemerintah, jarang mendapatkan bimbingan dan conseling berupa penyuluhan dan tidak adanya wahana/tempat petani belajar untuk meningkatkan kemampuan yang dibutuhkannya. Persoalan tersebut menjadi alasan para petani untuk membangun komunikasi transaksi dan interaksional dengan elit politik dalam pilkada 2015 di Konawe Utara agar permasalahan pertanian menjadi fokus utama dalam program pembangunan.

Permasalahan masyarakat agraris inilah, elit politik membentuk opini dan mengkonstruksi diri sebagai *public figure* visioner, ekspresif dramatik (gesture) dan pakaian ditampilkan dan dipertukarkan dalam panggung deklarasi, kampanye, sosialisasi dan dialog, debat kandidat, media cetak dan media social facebook, serta ditandai dengan kehadiran pesan-pesan politik yang "menyejukkan", janji-janji dan sumpah politik yang membawa nuansa "perubahan" untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat agraris, misalnya pasangan calon Aswad Sulaweman dan Abu Haera menyajikan pesan verbal; "sukses sebagai pemimpin dan melanjutkan program pemerintah yang sudah berjalan", "mewujudkan Kabupaten Konawe Utara yang berdaya saing, maju dan sejahtera", "GERBANG IDAMAN" (gerakan membangun infrastruktur dasar dan prasarana wilayah bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan), "GERAK TANI" (gerakan rakyat nelayan dan petani) dan lain sebagainya. Sedangkan Pesan-pesan komunikasi transaksional elit politik pasangan calon Ruksamin-Rauf mengangkat simbol pesan verbal yaitu "PERUBAHAN", "KONASARA" (koalisi rakyat membawa perubahan menuju konawe utara sejahtera dan beradab), "INSTAN" (Insentif Pertanian: menyediakan traktor, bibit, pupuk, menyediakan lahan, pembukaan kebun percobaan untuk meningkatkan hasil pertanian), PUKDES (pemberdayaan usaha kecil berbasis desa), STUB (Sejangkal Tanah untuk Budidaya)".

Hadirnya pesan-pesan yang tertuang dalam janji dan sumpah politik menjadikan masyarakat agraris menjadikan pilkada 2015 di Konawe Utara sebagai ajang interaksi dan transaksional politik terhadap elit politik. Masyarakat agraris di Konawe Utara secara demografi yang tinggal daerah pedesaan sangat sangat terbuka adanya praktek jual beli suara (*vote buying*) dibandingkan dengan daerah perkotaan dimana ruang geraknya terbatas karena "faktor *heterogenitas* dan *literasi* politik di kota lebih memadai. Praktek jual beli suara tersebut dilakukan sendiri oleh elit politik dan menggunakan jasa perantara atau *vote broker* (*jasa perantara*) melalui tim pemenangan/tim sukses sebagai bagian dari strategi untuk memenangi persaingan dengan elit politik lainnya. *Vote broker* pula dilakukan oleh tokoh masyarakat, kepala desa, ketua RT, ketua kelompok tani, bahkan masyarakat agraris itu sendiri. *Vote broker* inilah yang mewakili elit politik mendistribusikan uang atau barang lainnya kepada masyarakat agraris menjelang pilkada 2015 di Konawe Utara. Hasil observasi diperoleh bahwa uang yang beredar sekitar 300 s/d 1 juta/kepala khususnya pada daerah-daerah terpencil dan aspek ekonominya rendah. Maraknya jual beli suara pada Pilkada 2015 di Konawe Utara, ternyata ada sebagian besar masyarakat agraris yang tidak mau terjebak dengan jual beli suara, mereka ini adalah memilih berdasarkan rasionalitas hati nurani. Kenyataan lainnya tidak bisa tertutupi bahwa ada sebagian besar pula masyarakat agraris yang melakukan *vote buying* terhadap elit politik melalui tim sukses. Masyarakat agraris yang menolak *vote buying*, mereka melakukan ronda keliling untuk menjaga aksi *vote buying* baik disiang hari maupun malam hari.

Atas dasar pandangan itulah, maka penelitian ini menjadi penting hadir di tengah "kegalauan" bangsa yang menginginkan pemimpin transformatif bukan pemimpin transaksional. Penelitian ini adalah motivasi komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris pada pilkada 2015 di Kabupaten Konawe Utara.

METODOLOGI

Paradigma penelitian ini adalah kritis yang sangat menaruh perhatian terhadap pembongkaran aspek-aspek yang tersembunyi di balik kenyataan yang tampak (*virtual reality*) guna dilakukannya kritik dan perubahan (*critique and transformation*) terhadap struktur sosial, dalam hal ini antara elit politik dengan masyarakat agraris, dengan pendekatan; (1) fenomenologi interpretif deduktif mengacu pada Popper (Bungin, 2007:144). (2) Studi Kasus (*Causal Study*) yang mengacu pada perspektif Lincoln dan Guba (Mulyana, 2004:201). Studi kasus yang digunakan adalah kasus ganda (*multy cases*). Keduanya digunakan dalam rangka merancang sebuah model komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris. Informan penelitian ini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tim sukses ditetapkan secara *purposive sampling*, sedangkan masyarakat agraris dalam hal ini petani dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Teknik pengumpulan

data melalui instrument wawancara, teknik *shadowing* dengan cara membuntuti elit politik, observasi partisipatif, *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui tahapan teknik analisis interaktif Miles & Huberman (1992: 19-21) yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Motivasi Kepentingan Politik: Kekuasaan

Motivasi komunikasi transaksional elit politik pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara adalah dorongan yang dilakukan elit politik untuk mempengaruhi masyarakat agraris agar harapan dan keinginan elit politik tersebut dapat tercapai dan menduduki kekuasaan di pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para elit politik, secara faktual bahwa motivasi para elit politik tampil di arena Pilkada tujuannya adalah karena adanya kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan ini pada teori Maslow terletak antara kebutuhan akan fisiologis, penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri dalam struktur pemerintahan puncak. *Pertama*; Motivasi elit politik Aswad Sulaeman pada Pilkada 2015 di Konawe Utara karena motivasi kekuasaan, karena apa yang dilakukannya semasa pemerintahannya pada periode pertama belum sepenuhnya terwujud. Motivasi inilah yang mendasari untuk melanjutkan pembangunan di Konawe Utara yang dilakukan bertahap. Motivasi atas kekuasaan ini pula dianggapnya bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus terutama pembangunan infrastruktur dasar serta pembangunan sesuai ketentuan wilayah, meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui peran serta kelembagaan desa dan pemantapan informasi teknologi diseluruh wilayah Konawe Utara. *Kedua*, motivasi elit politik Ruksamin pada Pilkada 2015 di Konawe Utara sekiranya karena motivasi atas kekuasaan puncak sesuai dengan filosofinya "perubahan". Terlihat jelas bahwa Ruksamin merupakan wakil bupati dari pemerintahan sekarang. Faktualisasi dari motivasinya tampil pada Pilkada 2015 ini tentunya tidak terlepas dari "dendam masa lalu" karena saat peneliti menanyakan hal tersebut saat melakukan wawancara terlihat jelas bahwa adanya rasa dendam ketika membicarakan permasalahan pemerintahan di Konawe Utara. Motivasi selanjutnya adalah karena telah berjanji dan bersumpah akan memperjuangkan kepentingan masyarakat Konawe Utara dengan melakukan perubahan dan menjawab segala tantangan pembangunan. Janji tersebut akan mengakhiri berbagai penderitaan masyarakat Konawe Utara dengan memanfaatkan dan memberdayakan potensi sumber daya manusia (SDM) putra-putri asli Konawe Utara untuk mengisi struktur pemerintahan.

Berdasarkan fakta tersebut, kedua elit politik ini pada dasarnya dapat dipetakan dalam 2 bagian. *Pertama*; Motivasi Aswad Sulaeman tampil pada Pilkada 2015 di Konawe Utara karena motivasi akan kekuasaan dan keberlanjutan program pembangunan yang telah dirintis pada periode kepemimpinan sebelumnya. *Kedua*; Motivasi Ruksamin tampil

pada Pilkada 2015 karena motivasi kekuasaan, balas dendam dan melakukan perubahan melalui janji dan sumpah kepada masyarakat di Konawe Utara.

2. Motivasi hubungan sosial

2.1. Kekeluargaan dan kekerabatan

Proses Pilkada Konawe Utara memberikan gambaran kepada kita bahwa elit politik dan masyarakat agraris saling mendukung dalam proses politik yang berlangsung di daerah, sehingga mereka menjadikan identitas keluarga (*klan*) sebagai simbol identitas politik dalam komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris, sehingga dapatlah dikatakan bahwa di Kabupaten Konawe Utara telah bangkit politik kekerabatan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari kalangan elit politik, motivasi mereka dalam memilih karena keluarga (*klan*) menjadi bagian dari simbol sekaligus pesan dalam komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris. Pertimbangan menentukan pilihan diwarnai dengan kemunculan faktor *genealogis* yang ditandai melalui nama-nama kedaerahan atau asal muasal elit politik yang tampil pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara. Sekjen tim pemenang Konasara menyebutkan bahwa kekuatan keluarga (*klan*) dalam Pilkada 2015 ini sangat kuat pengaruhnya terutama mereka dari kalangan tokoh pendiri Kabupaten Konawe Utara, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama sehingga sangat sulit untuk menerapkan demokrasi substantif yang didasarkan pada kemampuan dari segi pengalaman apalagi umur seseorang. Pasalnya mereka yang menjadi bagian dari klan tersebut terus memelihara dan melanggengkan simbol-simbol karakter masyarakat Konawe Utara yang dimilikinya untuk mempertahankan dominasi politik pada Pilkada 2015.

Meski nama keluarga atau klan lebih banyak dibicarakan dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan rekrutmen birokrat pada tingkat kabupaten Konawe Utara, namun nyatanya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nama keluarga (*klan*) pada kontestasi Pilkada Konawe Utara tahun 2015 masih menjadi salah satu jaminan keterpilihan dan dalam penentuan jabatan. Jika dalam kontestasi Pilkada sebelumnya pada tahun 2010 untuk masa jabatan 2010-2014 yang didiami secara mayoritas etnis Tolaki. Kehadiran nama-nama klan seperti; Aswad Sulaeman, Ruksamin, Abdul Hamid Basir, Tamrin Pawani, Mustari, Muh. Nur Sinapoy, Apoda, Kahar, Sudiro, Siti Halna, Herry Asiku, Andhy Beddu, Herry Hermansyah Silondae, Andi Syamsul Bahri, Slamet Riadi, Rudin Lahadi dan lain sebagainya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa *klan* Konawe Utara saat ini menguasai beberapa jabatan penting di pemerintahan di Konawe Utara, diantaranya adalah Rauf (Ketua DPRD) yang sementara maju sebagai calon Wakil Bupati Ruksamin (Wakil Bupati Konut), Abu Haera (Sekda Konut), dan lain sebagainya. Etnik Tolaki di Konawe Utara pada

umumnya etnik Tolaki, nama klan ini justeru berkembang di era politik terbuka saat ini. Kemunculan beberapa nama keluarga (*family nama*) dalam kancah politik Pilkada 2015 di Konawe Utara, menunjukkan bahwa eksistensi keluarga tersebut dibangun dengan menggunakan berbagai instrumen sosialisasi politik. Proses kaderisasi dan penguasaan akses-politik telah mendorong mereka sebagai tokoh yang secara sengaja diposisikan dan konstruksi oleh-oleh patron-patron yang berada disekitar tokoh sentral. Klan-klan tersebut terus melanggengkan kekuasaan politik dan pemerintahan karena mereka memiliki modal dan jaringan yang telah berakar dari zaman kerajaan yang kemudian dipertegas dengan kekuasaan yang pernah diduduki sejak jaman orde lama hingga orde baru. Klan-klan tersebut masing-masing mewakili keluarga dengan generasi politik yang pernah memiliki sejarah atau bahkan masih memiliki kekuasaan di daerah Konawe sebelum mekar dan Konawe Utara setelah mekar terutama yang didiami etnik Tolaki.

Kemunculan politik kekerabatan pada Pilkada 2015 di Kabupaten Konawe Utara merupakan wujud dari kuatnya politik *patronase* dengan oligarki yang masih terpelihara pada masyarakat di Kabupaten Konawe Utara. Mereka yang telah memperoleh kekuasaan politik melalui perjuangan keras pada awal membangun klan politik mewariskan modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbol kepada keturunan atau keluarganya sehingga memberikan kemudahan pada generasi selanjutnya untuk memperoleh kekuasaan hanya dengan mengelola dengan baik modal yang diwariskan tersebut. Sebagaimana Kacung Marijan (1997) menyebutnya sebagai modal politik seseorang dalam politik lokal di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disebut King dan Wilder (Maunati, 2007:70) bahwa etnisitas merupakan ekspresi dari produk masa lalu, kebangkitan asal-usul yang sama, hubungan sosial dan kesamaan nilai-nilai budaya yang sifatnya tidak konstan, tidak kekal dan dapat dibentuk dan dikonstruksi.

2.2. Kedekatan wilayah: Faksi Kedaerahan

Kedekatan daerah terbentuk dalam ranah politik pada Pilkada 2015 di Konawe Utara hingga menimbulkan adanya faksi kedaerahan. Kedekatan wilayah dalam komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan bahwa para elit politik berusaha menampilkan karakter ranah politik antar elit politik tersebut. Elit politik yang mengatasnamakan putra asli daerah Konawe Utara berupaya tampil berbeda dari ranah politik daerah induknya, Kabupaten Konawe. Elit politik tersebut berupaya mengamankan ruang ekspresi politik mereka dari campur tangan pihak luar (*outsider*) dengan cara *memblow-up* stigmatisasi kategori “putra daerah” dan “bukan putra daerah” Konut. Sementara elit politik lainnya mencoba membangun stigmatisasi politik “putra daerah dan bukan putra daerah” dalam ranah kepemimpinan di Kabupaten Konawe Utara. Kedua pandangan ini dapat dikatakan

bahwa ranah politik Kabupaten Konawe Utara pada Pilkada tahun 2015 cenderung mengandung banyak resistensi *socio-historis* dan *kultural* bagi tumbuhnya stigmatisasi politik. Stigmatisasi yang dibangun para elit politik ini akan membawa dampak terhadap masyarakat agraris yang notabenenya mereka mayoritas sebagai pendatang.

Faktualisasi dari hasil wawancara dengan elit politik dan masyarakat agraris memberikan penjelasan bahwa stigmatisasi politik "putra daerah" Konut masih lebih bersifat politisasi fakta-fakta sosial biasa yang bersifat tidak normatif, seperti administrasi kependudukan, alamat tempat tinggal, dan riwayat pekerjaan masa silam. Kata lain, klaim putra daerah setempat dapat dilekatkan pada warga masyarakat yang sejak awal tercatat atau pernah terdaftar sebagai penduduk kabupaten Konawe bagian utara, serta pernah bekerja sebagai pegawai negeri atau pejabat penting di daerah itu. Sangat kecil faktor kesamaan identitas etnik atau asal usul kesatuan wilayah adat muncul dalam wacana stigmatisasi politik putra daerah dan bukan putra daerah pada konteks perpolitikan lokal di Konawe Utara. Bila kemudian terdapat pada Pilkada Kabupaten Konawe utara tahun 2015 ini, riak-riak klaim putra daerah cukup marak dikalangan masyarakat Konawe Utara, mengakibatkan munculnya demonstrasi anti Aswad Sulaeman, maka hal itu dapat dipastikan tidak berlangsung dalam spektrum kesadaran politik, melainkan hanya berada pada spektrum perhimpitan kepentingan ekonomi, yakni untuk memperebutkan kesempatan dan lapangan kerja di birokrasi pemerintah daerah.

Hal ini pula dinyatakan oleh masyarakat agraris etnis pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan dan tinggal desa Puhialu, menentukan sikap politiknya kepada elit politik yang berasal dari konawe utara, karena di Konawe Utara mereka hidup dan mencari makan. Begitu pula hasil FGD dengan masyarakat agraris bahwa motivasi masyarakat agraris memilih karena kedekatan tempat tinggal mereka yang dianggap akan memperhatikan daerah Konawe Utara terutama fokusnya pada pembangunan pertanian.

Konteks menjelang Pilkada tahun 2015 di Konawe Utara, isu-isu putra daerah dan bukan putra daerah menjadi bagian dominan dari konstelasi politik di Konawe Utara, walaupun kenyataannya masih tergambar pada ilustrasi politik pada Pilkada tahun 2010 bahwa isu putra daerah dan bukan putra daerah tidak menjadi bagian dominan dari konstelasi politik setempat. Justru menjadi cukup dominan adalah wacana kompetisi kekuatan politik horizontal yang muncul dalam bentuk faksi-faksi politik internal, seperti faksi politik Asera-Wiwirano dan faksi politik Lasolo. Spektrum yang lebih sempit lagi, faksi-faksi politik internal di Konawe Utara ini juga dibangun oleh semangat kesatuan politik antar kecamatan dan desa, tak terkecuali dikalangan masyarakat agraris itu sendiri.

2.3. Sosial dan budaya

Motivasi komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris pada Pilkada tahun 2015 di Konawe Utara menunjukkan bahwa elit politik membangun *image*

kepada masyarakat agraris melalui nilai-nilai karakter budaya lokal dalam masa kampanye pada Pilkada Kabupaten Konawe Utara. Kearifan nilai-nilai karakter budaya lokal tersebut ditemui dalam pepatah atau pun petuah yang melekat pada aktivitas keseharian menjelang Pilkada antara elit politik dengan masyarakat agraris, bahkan tercermin dalam panggung politik.

Motivasi komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai karakter budaya lokal, baik dalam kegiatan silaturahmi, sosialisasi, deklarasi, maupun kampanye pada Pilkada Kabupaten Konawe Utara. Nilai-nilai karakter budaya tersebut dikemas dalam bentuk diplomasi tradisional di arena pertarungan antar elit politik pada Pilkada 2015 di Konawe Utara. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat agraris agar pada saat pemilihan masyarakat memberikan suara dukungan kepada para elit politik tersebut. Hal ini terlihat bahwa elit politik berusaha mengedepankan potensi-potensi yang dimiliki putra maupun putri daerah Konut dengan menampilkan atribut-atribut lokal daerah itu sendiri. Misalkan, kegiatan kesenian, budaya gotong royong yang dimiliki Konawe Utara.

Berdasarkan hasil *shadowing* lapangan tanggal 6 desember 2015, ditemukan adanya pola-pola komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara dengan melihat dan memperhatikan kearifan lokal di tengah-tengah masyarakat agraris di Kabupaten Konawe Utara antara lain: *Pertama*; Adanya pola komunikasi vertikal (*top down*, dari pemimpin kepada yang dipimpin). Pelaksanaan nilai-nilai budaya menunggu perintah dari elit politik dan ini menjadi suatu keuntungan bagi elit politik tersebut untuk melakukan komunikasi transaksional kepada masyarakat agraris. Komunikasi transaksional dalam bentuk vertikal yang dilakukan oleh para elit politik pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara dengan memanfaatkan kearifan lokal juga terasa pada temu warga dengan mengedepankan budaya *mete' alo-alo* (bantu-membantu), upacara tanam dan potong padi, kegiatan keagamaan (yasinan) atau pun pada setiap upacara penyambutan tamu. Pola ini lebih dimanfaatkan oleh para elit politik dengan menggunakan simbol-simbol kedaerahan untuk menjalin komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara. *Kedua*; Adanya pola komunikasi horizontal (antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok). Terkait dengan kearifan lokal, para elit politik tertantang untuk mengenal budaya setempat. Segala tindakan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berkembang pada budaya setempat itu. Hubungan kekerabatan dalam masyarakat Konawe Utara sangat kental terlebih lagi hubungan persukuan (*se-suku*) dimana dalam kearifan lokal yang ada di Kabupaten Konawe Utara, komunikasi transaksional seperti ini terjadi dalam kelompok dimana interaksi terjadi antara individu didalam kelompok. Hal ini

terlihat dengan komunikasi politik dan diplomasi politik yang dilakukan oleh para elit politik terutama jelas terlihat adanya pesan komunikasi politik yang ditransaksikan akan lebih efektif dengan mengkondisikan kelompok persukuan terutama pada persukuan masing-masing elit politik. Komunikasi politik dan diplomasi politik secara horizontal juga terlihat dilakukan oleh para elit politik dengan mendekatkan diri dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat agraris di Konawe Utara seperti budaya gotong royong. *Ketiga*; Adanya pola komunikasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi). Pendekatan yang selalu diambil dalam pola ini adalah tingkat kepercayaan antara elit politik dengan masyarakat agraris yang diikat dengan sumpah dan janji setia untuk mendukung elit politik yang tampil pada Pilkada tahun 2015 di Konut.

2.4. Kesamaan Etnis

1. Kategori Identitas Elit Politik Masyarakat Agraris Pendatang dan Orang Asli Konawe Utara

Dua kategori identitas tersebut adalah hasil konstruksi identitas, sehingga menjadi bentuk pembeda dalam komunikasi transaksional elit politik. Isu putra daerah berkorelasi dengan konsepsi pemberdayaan masyarakat lokal yang lalu dipertegas dan dipertajam dengan adanya *fanatisme* daerah sehingga simbolisasi etnik lokal semakin berkembang di berbagai bidang. Simbolisasi kultural berevolusi menjadi simbolisasi politik lokal yang telah menjadi konsumsi politik bagi kelompok-kelompok elite lokal untuk mendapatkan simpatisan dari etnik sendiri. Isu putra daerah menjadi komoditi politik lokal ini sering mencuat ketika menjelang suksesi kepemimpinan daerah dan pada saat pilkada.

Kecenderungan kalangan elit politik dalam menggunakan isu-isu karena target yang ingin didapat adalah adanya kelekatan dengan etnis yang menjadi obyeknya. Gambaran dikotomis etnik pendatang atau pribumi dalam politik di Konawe Utara menunjukkan bahwa identitas etnik pribumi sangat memperhitungkan keberadaan etnik pendatang seperti etnis Bugis-Makassar, Buton, Muna, Jawa, Ambon, Bajo, dll. Identitas pendatang yang disematkan kepada siapa saja yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau *genealogis* dengan etnik politik lokal di Konawe Utara merupakan bentuk proteksi politik yang dilakukan oleh elit-elit politik lokal untuk menjaga dan mengembangkan kekuasaan. Tindakan akomodatif dan kompromi oleh elit-elit politik lokal (yang dianggap orang asli) nampaknya dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperluas dan menjangkau elit-elit politik dan sosial masyarakat pendatang.

Itu artinya komunikasi transaksional politik harus terjalin dengan baik kepada para elit politik yang berasal dari etnik pendatang, baik yang di luar struktur politik resmi maupun yang saat ini menjabat dalam struktur pemerintahan di Konawe Utara. Kepentingan tokoh elit politik lokal dalam hal ini adalah bagaimana menciptakan patron-patron politik di kalangan pendatang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan politik yang lebih besar.

Elit-elit politik etnik pendatang, dilain pihak menjadikan kesempatan tersebut untuk meraih dalam posisi dibawah kekuasaan puncak. Proporsi etnik pendatang yang cukup besar akan memberi peluang yang besar berpartisipasi dalam perhelatan politik di Konawe Utara. Ini tentu saja dengan asumsi bahwa preferensi pemilih dalam Pilkada 2015 di Konawe Utara masih diwarnai oleh isu etnisitas. Meskipun jika di lihat bahwa dengan sistem pembagian daerah pemilihan, yang seringkali memecah unit wilayah yang di dalamnya terkonsentrasi pemilih dengan etnik tertentu sehingga memperkecil peluang untuk memenangkan suara terbanyak. Kompromi antara elit-elit politik etnik pendatang dengan elit politik lokal, merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Langkah tersebut, bagi elit politik pendatang adalah yang paling tepat, karena mereka harus menyadari akan adanya tekanan yang kuat dari publik terutama etnik lokal terhadap kepemimpinan orang-orang yang berasal dari etnik pendatang. Lingkungan politik di Konawe Utara, dalam beberapa kasus masih menerapkan adanya *power sharing* dalam menetapkan kepemimpinan pada lembaga publik terutama lembaga politik guna menghindari terjadinya konflik. *Power sharing* dalam kadar tertentu merupakan pilihan bijaksana untuk menghindari pertikaian politik yang melibatkan isu etnik, tetapi di sisi lain seringkali melupakan aspek kompetensi dan kapasitas seseorang.

2. Masyarakat Agraris Pendatang sebagai Orang Konawe Utara

"Orang Konawe Utara" adalah sebuah konstruksi identitas yang merujuk kepada wilayah administratif yang tidak menggambarkan sebuah etnik tertentu. Orang Konawe Utara adalah sebutan yang menunjukkan bentuk penyesuaian etnik pendatang agar diterima sebagai penduduk Konawe Utara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan etnik apa saja yang berdomisili di daerah ini. Semua informan penelitian dari kalangan masyarakat agraris dalam penelitian mayoritas beretnis di luar Konawe Utara. Ketika peneliti menanyakan berasal dari etnik mana? Mereka yang beretnik pendatang menjawab sebagai orang Konawe Utara. Pertanyaan yang merujuk kepada identitas etnik mereka ketika menanyakan suku apa, informan lalu menjawab dengan etnik Tolaki, etnik Ambon, etnik Bajo, etnik Bugis-Makassar, etnik Buton, Etnik Muna, etnik Jawa, dan lain-lain.

Usaha untuk memperoleh pengakuan sebagai bagian dari masyarakat pribumi dalam berbagai aktifitas baik sosial, ekonomi dan politik seringkali malah mempertegas batas identitas tersebut. Ketika komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris berlangsung dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, berbagai atribut yang melekat akan tampak lebih menonjol, hal ini karena suatu identitas yang melekat akan sulit untuk hilang dan tereduksi oleh faktor interaksi. Fakta ini terungkap pada etnis Jawa bahwa walaupun mereka terlahir di Jawa namun mereka tetap mengakui bahwa mereka adalah orang Konawe Utara karena mereka tinggal sudah belasan tahun. Begitu pula etnik

Bugis bahwa sebagai orang bugis dan besar di Konawe Utara mereka selalu mengatakan bahwa mereka adalah orang Konawe Utara.

Konteks pilkada di Konawe Utara, para etnik pendatang melihat bahwa calon yang tampil adalah pribumi yakni etnik tolaki. Motivasi para etnik pendatang tersebut tidak lagi melihat latar belakang calon, akan tetapi mereka adalah bagian dari orang Konawe Utara sehingga mengharapkan para calon kepala daerah tidak membedakan etnik apalagi suku, karena mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai petani.

Menjadi orang "Konawe Utara", sebagai suatu identitas yang netral, seseorang melakukan berbagai bentuk penyesuaian diri dengan menggunakan berbagai atribut dan simbol-simbol etnik dalam interaksi dan komunikasi di masyarakat, termasuk dalam kegiatan komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris. Penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi transaksional dengan penduduk asli Konawe Utara, mencoba melakukan penyesuaian dalam hal logat dan aksen khas lokal Konawe Utara dalam komunikasi adalah bentuk-bentuk upaya penyesuaian dalam interaksi sosial. Tidak hanya itu, penggunaan pakaian khas atau pakaian adat dalam kegiatan-kegiatan resmi maupun dalam acara keluarga juga menjadi hal yang biasa dilakukan.

3. Atribut dan Simbol-simbol Identitas Etnik pada Panggung Politik

A. Atribut Artifisial pada Panggung Politik

Pengelolaan kesan (*impression management*) yang dilakukan untuk mencapai tujuan elit politik adalah dengan mengenakan atribut yang bersifat artifisial secara cukup menonjol. **Pertama**, ekspresi identitas melalui pakaian yang dikenakan. Untuk disebut berpenampilan "sederhana" (Ruksamin-Rauf) ataupun "keren" (Aswad Sulaeman-Abu Haera) kebanyakan mengenakan stelan jas dengan berbagai asesoris yang menyertainya seperti dasi dan kopiah. **Kedua**, kendaraan yang dimiliki. Persoalan kendaraan ini menjadi cukup penting artinya dalam aktivitas elit politik dalam komunikasi politik mereka. Hasil *shadowing* tanggal 27-28 Juli 2015 pada kegiatan deklarasi para elit politik menunjukkan bahwa bagi pasangan Aswad Sulaeman-Abu Haera dan tim suksesnya menggunakan kendaraan mewah menjadi ciri khas tersendiri yang memiliki nilai prestisius lebih tinggi. Meski demikian kepemilikan kendaraan menjadi simbol keamanan untuk mempertegas status elit politik pasangan Aswad Sulaeman-Abu Haera. Sebaliknya pada elit politik Ruksamin-Rauf yang berpenampilan sederhana dengan menggunakan kendaraan rental yang tidak terlalu menonjol"

B. Bahasa dan Dialek Tolaki sebagai identitas dalam komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris

Ciri-ciri lain yang menjadi atribut yang dapat menegaskan Identitas seseorang dalam konteks ruang politik Konawe Utara adalah bahasa daerah dan logat elit politik. Penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan komunikasi transaksional antara elit politik

dengan masyarakat agraris di Konawe Utara lebih banyak dilakukan oleh kedua elit politik yang menganggap diri mereka sebagai etnik asli Tolaki atau etnik yang lahir dan besar di tanah Konawe Utara. Lain pihak mereka yang berasal dari etnik lain atau yang dianggap sebagai pendatang (masyarakat agraris) akan berusaha mempelajari bahasa lokal sebagai bentuk penyesuaian diri agar dapat diterima di masyarakat lokal terutama dalam aktivitas politik.

Penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan komunikasi transaksional terutama dalam kaitan lobi dan upaya menyatukan pendapat pengambilan keputusan seringkali dianggap lebih efektif oleh para elit politik yang berasal dari etnik yang sama. Penilaian itu didasarkan pada kemudahan menjalin pendekatan baik secara persuasif maupun dengan cara coercive kepada rekan sejawat yang memiliki etnik sama tentu dengan bungkus demi kepentingan rakyat. Hal tersebut terlihat pada etnik Jawa di Kecamatan Asera bahwa ketika mereka bertemu dengan konstituen dan rekan-rekan yang orang Tolaki, mereka berusaha menyesuaikan diri dengan bahasa mereka walaupun saya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi logat dalam dialeg tolaki. Sebaliknya jika interaksi sesama etnik Jawa menggunakan bahasa/dialek Jawa. Konteks ini menjelaskan bahwa logat seseorang akan dapat menegaskan identitas seseorang. Konteks elit politik Konawe Utara, logat yang terdengar ketika seseorang berbicara dapat menimbulkan *stereotype* tertentu yang seringkali dijadikan sebagai bentuk politik pembeda. Seorang elit politik yang beretnis Bugis amat mudah dikenali di dalam rapat-rapat tim sukses ketika sedang berbicara ataupun berpidato, demikian halnya dengan elit politik lainnya seperti Muna, Jawa, Bugis, ambon, dan lain sebagainya.

C. Motivasi ekonomi Masyarakat Agraris

Motivasi ekonomi masyarakat agraris pada Pilkada 2015 di Konawe Utara adalah peningkatan investasi ekonomi bidang pertanian. Peningkatan investasi terutama peningkatan hasil pengolahan lahan pertanian di Konawe Utara akan sangat berpengaruh jika pemerintah mengabaikan pembangunan infrastruktur daerah, teknologi pertanian, pembukaan lahan, bantuan modal, pembukaan jalan usaha tani, pupuk, bibit, listrik dan lain sebagainya. Inilah motivasi ekonomi pada tingkat kebutuhan pokok manusia yang paling dasar atau fisiologis.

Dibalik motivasi masyarakat agraris di Konawe Utara, menginginkan kehidupan yang lebih baik begitu juga masyarakat agraris di Konawe Utara yang menginginkan agar para elit politik lebih fokus dan mampu membawa kearah pembangunan pertanian di Konawe Utara yang lebih baik bukan kearah yang lebih buruk. Mewujudkan hal tersebut, masyarakat agraris memilih dan menyerahkan tanggung jawab pembangunan pertanian kepada elit politik yang tepat yaitu elit politik yang mempunyai kemampuan untuk memimpin dan

mampu membawa masyarakat agraris kearah kemajuan untuk dapat memberikan pemerataan kesejahteraan. Hal itu merupakan salah satu upaya yang bisa dimulai oleh warga yang mempunyai hak untuk memilih elit politik dengan pertimbangan kompetensi yang dimiliki setiap elit politik secara rasional dan sesuai dengan hati nurani tanpa paksaan, bahwa calon yang akan menjadi pemimpin daerah akan mampu untuk membangun daerah kearah yang lebih baik bukan memilih elit politik karena dipengaruhi oleh uang atau materi lainnya.

Kenyataan yang tampak pada Pilkada 2015 di Konawe Utara, masyarakat agraris dalam menentukan arah pilihan politiknya memang benar-benar didasarkan pada *track record* atau program yang ditawarkan dan kompetensi yang dimiliki elit politik dalam menjalankan pemerintahannya. Masyarakat agraris cenderung berpikir panjang mengenai dampak yang dapat ditimbulkan ketika mereka tidak merujuk pada kompetensi dan komitmen untuk pembangunan pertanian di Konawe Utara. Inilah yang menjadi motivasi masyarakat agraris berfikir jangka panjang untuk kelangsungan hidup mereka dari hasil olahan pertanian. Motivasi mereka ini karena elit politik dapat membantu mereka secara ekonomi melalui program-program yang telah direncanakan dalam pembangunan Konawe Utara. Walaupun faktanya bahwa masyarakat di Konawe Utara sekarang ini masih banyak yang hidup dalam kekurangan materi bahkan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya saja kesulitan, khususnya masyarakat agraris yang mayoritas penduduknya bekerja keras terlebih dahulu dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

KESIMPULAN

Motivasi komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris antara lain (1) Motivasi kepentingan politik. Motivasi elit politik untuk kekuasaan. (2) Motivasi hubungan sosial. motivasi elit politik dan masyarakat agraris karena keluarga (*klan*) (3) Motivasi kedekatan wilayah: Faksi kedaerahan bahwa kedekatan daerah terbentuk dalam ranah politik pada pilkada 2015 di Konawe Utara hingga menimbulkan adanya faksi kedaerahan. (4) Motivasi hubungan Sosial dan budaya. Motivasi ini untuk mengangkat nilai-nilai karakter budaya lokal dikemas dalam bentuk diplomasi tradisional. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat agraris. Elit politik berusaha mengedepankan potensi-potensi yang dimiliki putra maupun putri daerah Konut dengan menampilkan atribut-atribut lokal daerah itu sendiri. Kesamaan Etnis sangat mempengaruhi proses komunikasi transaksional antara elit politik dengan masyarakat agraris. (5) Motivasi ekonomi Masyarakat Agraris adalah peningkatan investasi ekonomi bidang pertanian melalui pembangunan infrastruktur daerah, teknologi pertanian, pembukaan lahan, bantuan modal, pembukaan jalan usaha tani, pupuk, bibit, listrik dan lain sebagainya.

REFERENSI

- Almond, Gabriel A & G Bingham Powell. 1966. *Comparative Politics, A Development Approach*. Boston: Little Brown.
- Berne, Eric. 1964. *Games People Play*. New York: Grove Press
- Bottomore, TB. 2006. *Elit dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institute.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia.
- , 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- , 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2006. *Sosiologi komunikasi: Teori Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social*, Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- , 2007. *Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma, dan Diskursus Tehnologi Komunikasi di Masyarakat*. Kencana: Jakarta.
- Burgoon, M. 1982. *Communication Yearbook 6*. California: SAGE Publications
- Burgoon, Michael and Noel E. Doran (ed). 1982. "Issues in Communication Theory: A Metatheoretical Analysis", *Communication Yearbook 5*, Michigan State
- Burgoon, M., Hunsaker, FG, dan Dawson, EJ. 1994. *Komunikasi manusia*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Brown, J.F, 1936. *Psychology and Social Disorder*. New York: Mc Graw Hill
- Cangara, Hafied. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2009. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Effendy, Onong Uchjana. 2001. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 1993. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- , 2011. *Ilmu Komunikasi Teori da Praktek*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- , 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya. Bhakti, Bandung.
- G. Goble, Frank, 1992. *Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow, terj The Third Force, The Psycology of Abraham Maslow* oleh Drs. A. Supratiknya. Yogyakarta: kanisius.
- Hasrullah. 2001. *Megawati dalam Tanggapan Pers*. Yogyakarta: LKiS
- Hidayat. Syarif, 2009. *Pilkada, Money Politics and the Dangers of "Informal Governance" Practices. Dalam Deepening Democracy in Indonesia*. Edited by Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyanto. Institute of Southeast Asian Studies: Singapura.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

-
- Kraus, Sidney and Davis, Dennie. 1978. *The Effects of Mass Communication on Political Behavior*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press
- Lasswell, Harold. 1972. *Politics: Who Gets What, When, How*, New York: The World Publication Company.
- Landis, Paul H. 1948. *Rural Life in Proccess*. United States of America: McGraw – Hill.
- Littlejohn, Stephen W. 2001. *Theories of Human Communication*. USA: Wadsworth Publishing.
- , 2002. *Theories of Human Communication*. California: Wadsworth Publishing Company
- Mas'oed Mohtar dan Colin Mac Andrews. 1986. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- , 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Maslow, Abraham H. 1884. *Motivasi dan Kepribadian: Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia* (judul asli: *Motivation and Personality*), diterjemahkan oleh Nurul Iman, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1984
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*. (Edisi terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi), UI Press, Jakarta.
- Muhammad, Hasyim. 2002. *Dialog antara Tasawuf dan Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 1992. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara, Jakarta
- Muhtadi, Asep Saeful. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 2008. *Kampanye Politik*. Humaniora, Bandung
- Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- , 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Rosda Karya, Bandung
- , 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja Rosda Karya, Bandung
- , 2001. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosda Karya, Bandung.
- , 2004. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- , 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Mulyana, Deddy dan Solatun. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi, Contoh- contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis*. PT. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Nimmo, Dan. 1987. *Political Communication and Public Opinion in America*. California: Goodyear Publishing Company.
- , 1989. *Komunikasi Politik (Khalayak dan Efek)*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- , 2004. *Komunikasi Politik komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
-

- , 2005. *Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 2006. *Komunikasi Politik. Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 1999. *Komunikasi Politik (komunikator, pesan, dan media)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2005. *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- , 2009. *Komunikasi politik media massa dan kampanye pilihan*. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
- Rogers, Everett. M. 1994. *A History of Communication Study*. New York: The Free Press
- Roucek, Joseph S. dan Roland L. Warren. 1963. *Sociology an Introduction*. New Jersey: Littlefield.
- Sanderson, Stephen K. 2000. *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Diindonesiakan oleh Hotma M. Siahaan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Santoso, Budi 2010. *Politik Penguasa dan Siasat Pemoeda*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Scott, James C. 1994. *The Moral Economy of The Peasant: Rebellion and Subsistance in Southeast Asia*, diterjemahkan Hasan Basari, Jakarta: LP3ES.
- , 1976. *The Moral Economy of The Peasent*, New Heaven: Yale University Press
- , 1989. *Peasant Resistance*. New York: Rmunk Me Sharpe
- , 2000. *Senjata Orang-Orang Kalah: Bentuk- Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*, penerjemah: A. Rahman Zainudin, Sayogyo, Mien Joebhaar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 1994. *Pengantar Komunikasi*. Universitas Terbuka, Jakarta
- Shadily, Hassan. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sihaloho, Martua, dkk. 2010. *Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian di Indonesia: Transdisipil Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, dalam Sodality, Vol 4, No 1
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- , 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sulaiman, Nizam. 2002. *Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Sumaryono. 2013. *Heurmeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Kanisius. Yogyakarta.
- Sunaryo. 2009. *Money Politic OK. Rakyat Menyambut*. SPDT. Bandung.
- Suseno, Frans, Magnis, 1994. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Varma, S.P., 2007. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2001. *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Venus, Antar. 2009. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan kampanye komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- , 2004. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.